



AKHIRNYA DEWAN BERI PERSETUJUAN Aset Senilai Rp 266 Miliar Dilepas ke DIY

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akhirnya bernapas lega usai mendapatkan persetujuan dewan terkait penghapusan aset senilai Rp 266 miliar. Aset berupa tanah, sarana prasarana serta jalan dan jaringan tersebut pun langsung dilepas atau diserahkan ke Pemda DIY untuk dikelola.

"Sudah tidak ada permasalahan yang mengganjal antara dewan dengan Pemkot sehingga persetujuan sudah bisa dilakukan," tandas Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Yogya Drs Zenni Lingga usai rapat finalisasi, Jumat (30/9).

Diakuinya, sempat ada perbedaan persepsi antara panitia khusus (pansus) yang

membahas persetujuan dewan dengan tim Pemkot. Terutama terkait adanya searah terima prasarana, personel, perlengkapan dan dokumen (P3D) dengan Pemda DIY pada Selasa (27/9) lalu. Padahal saat itu dewan belum memberikan persetujuan sehingga dinilai cacat hukum.

Hanya, ungkap Zenni, ser-

ah terima tersebut disertai paragraf penjelasan. Yakni khusus mengenai aset atau sarana fisik, akan dilimpahkan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Dengan begitu, usai adanya persetujuan pihaknya langsung akan memproses. "Intinya, per 1 Januari 2017, sejumlah urusan yang sebelumnya dikelola Kota Yogya resmi berpindah ke DIY sesuai aturan dari pemerintah pusat," tandasnya.

Sejumlah urusan yang sudah dibahas bersama dewan tersebut ialah pengalihan Panti Karya, 11 SMA negeri

dan tujuh SMK negeri serta tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB). Sedangkan total aset yang akan dilimpahkan terbagi dalam enam bidang. Masing-masing tanah senilai Rp 57,7 miliar, peralatan dan mesin senilai Rp 68,4 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp 131,9 miliar, jalan dan jaringan Rp 270,3 juta serta konstruksi dalam pengerjaan Rp 7,3 miliar.

Selain itu masih ada urusan yang akan dilimpahkan ke pemerintah pusat, yakni pengelolaan Terminal Giwang. Jika nilai aset diluar

tanah dan bangunan mencapai di atas Rp 5 miliar, maka Pemkot akan mengajukan permohonan persetujuan ke dewan. Namun ditengarai, tidak sampai miliaran rupiah lantaran hanya pengelolaan sementara asetnya tetap milik Pemkot. "Tapi masih perlu kami bicarakan lagi khusus untuk Terminal Giwang ini. Soalnya pengelolanya kelak bukan Pemda DIY melainkan pemerintah pusat. Jika aset harus dilimpahkan sekaligus dan di atas Rp 5 miliar, pasti kami ajukan ke dewan dulu," urainya. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005